



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : BUMN/BUMD  
**LEMBAGA** : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)  
**UNIT KERJA** : PLN KANTOR PUSAT

**I. DATA PRIBADI**

- Nama** : BRAMANTYO ANGGUN PAMBUDI
- Jabatan** : EXECUTIVE VICE PRESIDENT CUSTOMER EXPERIENCE DAN EXCELLENCE SERVICES
- NHK** : 461985

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.250.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000		
2. Tanah Seluas 115 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.380.900.000</b>
1. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
2. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000		
4. MOBIL, HYUNDAI IONIQ 5 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 815.900.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>165.000.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.211.375.571</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>7.007.275.571</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>352.134.000</b>



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

6.655.141.571

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.